

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang sangat pesat ini pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu daerah untuk mengetahui tingkat target capaian keuangan daerah tersebut. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif atau memenuhi *value for money* serta transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya bisa mengurangi jumlah penganggaran serta menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah.

Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja keuangan terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan tersebut maka dapat dipastikan apakah pengambilan keputusan sudah dilakukan secara tepat dan objektif. Selain itu, dapat juga mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta menentukan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memperbaiki kinerja pada periode berikutnya.

Dalam PSAP No.4, keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan tingkat efektivitas. Pengukuran kinerja keuangan juga harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran dari rencana

strategis pemerintah dan indikator yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi, hal ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan pengelolaan manajerial yang bersih dari korupsi.

Tugas pokok pemerintah daerah saat ini yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan umum pada masyarakatnya. Ketika pemerintah daerah telah mampu memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat, maka dapat dikatakan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut tercapai. Dalam pelaksanaan layanan publik yang baik dibutuhkan dana yang benar-benar ditunjukkan untuk hal tersebut. Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat selain memberikan wewenang yang luas kepada daerah untuk mengatur pembangunan daerahnya, juga memberikan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya yakni dalam mengalokasikan pendapatan yang akan digunakan, termasuk dalam hal pengalokasian dana yang akan digunakan dalam kegiatan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin baik daerah dalam mengelola keuangannya maka akan memberikan dampak yang baik pula bagi tersedianya layanan publik. Layanan publik yang baik diharapkan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat.

Dari sisi pendapatan sendiri ada tiga pengukuran kinerja yaitu, pertama anggaran pendapatan yakni batas minimal jumlah target pendapatan yang harus diperoleh oleh pemerintah. Kedua pertumbuhan pendapatan yang

menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam memperoleh pendapatan mengalami kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Dan ketiga rasio keuangan yang menggambarkan tingkat kemandirian daerah. Sedangkan dari sisi belanja ada lima pengukuran, dua diantaranya yaitu pertumbuhan belanja yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ketahun dan rasio keserasian belanja yang menggambarkan keseimbangan antar belanja. Sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diharapkan dalam pengolahan pendapatan dan belanja yang ada untuk dialokasikan dengan tepat supaya kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Eka Marisca Harliyani (2016) dalam skripsi yang berjudul “ Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi” yang menyimpulkan bahwa pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap indeks pembangunan manusia yang dilaksanakan secara memadai, Rasio derajat desentralisasi fiskal dan keserasian belanja langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Provinsi, sedangkan pada rasio ketergantungan keuangan daerah, efektivitas PAD dan efisiensi PAD Provinsi Jambi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi. Terdapat perbedaan dalam judul yang akan diteliti, apabila penelitian yang dilakukan oleh Eka Marisca meneliti tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka penulisan dalam penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat, begitu juga dengan perbedaan lokasi dan waktu penelitiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, dimana kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur yang dapat digunakan dalam menilai kinerja pemerintah daerah, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Rasio kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio efektivitas PAD terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kureksari Kabupaten Sidoarjo di Provinsi Jawa Timur

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas dapat disusun pertanyaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat desa kureksari, waru, sidoarjo ?
2. Bagaimana pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kesejahteraan masyarakat pada desa kureksari, waru Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kureksari, Waru, Sidoarjo
2. Untuk menguji pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Khususnya Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan

Masyarakat Desa Kureksari, Waru. Sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pendapatan daerah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- b. Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, penelitian akan dilakukan pada masing-masing variabel guna mendapatkan penjelasan dan pemahaman mengenai pengaruh tiap-tiap variabel dengan kesejahteraan masyarakat. Karena ada

keterbatasan waktu, dana, teori-teori, dan agar penelitian ini dilakukan secara mendalam dan lebih terarah, maka penelitian ini dibatasi permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas. Penelitian ini difokuskan untuk menguji Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah khususnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas PAD dalam mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.